



## **Dukungan Negara Arab Saudi Terhadap Pemerintah Tiongkok Dalam Isu Diskriminasi Etnis Uyghur di Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**

**Niko Putra Arianta, Marten Hanura**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*"Ethnic Uyghurs are residents of the Xinjiang Region, Which is an ethnic minority in the People's Republic of China (PRC). There are subjective Chinese policies. Ethnic Uyghur are discriminated against by their own country and forced to slowly forget their true identity, namely Islam. Xinjiang where are attitude of Uyghur who seek justice and protest to the government, they are immediately arrested without going through a court process. Then, arrested Uyghur's are sent to re-education camps. The Chinese government's policy has received positive support from 37 countries and received and received negative support from 22 countries including Saudi Arabia. Saudi is the birthplace of Islam, which until now still uses the Shari'a system in state constitution. Saudi is an economically stable Islamic country and Saudi position should be the protector of Muslim in the Uyghur. But the similarities of identical does not ensure that Saudi to protect Uyghurs. This anomaly is the theme of this paper. This Paper was made by qualitative data. Through the Realism, This paper Analyzes Saudi Arabia's Foreign Policy which does not take a stand on this discrimination of Uyghur. Through 3 attributes of Realism namely ; Strength, Nationa Interest and Sovereignty, this paper try to illustrates that China's readiness to support the success of Saudi Vision 2030. Cause of this situation makes Saudi arabia not to take a stand to the Uyghur ethnic group."*

**Keywords :** *Uyghur , Saudi Arabia, Tiongkok, Xinjiang, Discrimination, Support*

### **PENDAHULUAN**

Kelompok etnis Uighur berada di daerah Xinjiang yang berada pada daerah yang cukup vital. Daerah ini berbatasan langsung dengan delapan negara di sekitarnya, diantaranya ; Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, India, Afghanistan, Pakistan, dan Tajikistan. Secara historis, masyarakat etnis Uighur dekat dengan kebudayaan Asia tengah. Hal ini merupakan salah satu alasan alasan pemerintah Tiongkok mengambil beragam tindakan yang cukup kontroversial di mata internasional.

Wilayah Xinjiang memiliki banyak potensi disektor ekonomi dan wilayah peradaban baru bagi bagsanya,oleh sebab itu Pemerintah Tiongkok aktif mempromosikan wilayah Xinjiang sebagai wilayah yang kaya akan peluang kerja. Alhasil, banyak warga bersuku Han (pribumi) bermigrasi ke wilayah ini untuk

mendapatkan pekerjaan dibidang industri gas dan mineral. Migrasi Han ke Xinjiang mencapai puncaknya pada periode tahun 1960-1964 yang mewakili 8,65 persen dari total aliran antar provinsi di Tiongkok. (Zai Liang dan Michael J. White, 1996). Meskipun tingkat migrasi ke Xinjiang menurun pada tahun 1970an, selama periode 1953-1983 secara garis besar, Xinjiang masih menduduki peringkat kedua setelah Heilongjiang sebagai wilayah tujuan yang diminati bagi para migran antar provinsi (Yuan, 1990). Namun hal ini juga tentu membawa pengaruh besar untuk stabilitas persaingan di pasar ketenagakerjaan.

Akibat ketimpangan dan diskriminasi sosial dan ekonomi yang terkonstruksi di wilayah ini, Masyarakat etnis Uyghur sulit untuk bersaing di pasar kerja yang bersaing dengan etnis HAN (pribumi), dengan begitu banyak anak-anak muda Uyghur termotivasi untuk meninggalkan wilayah Xinjiang dan mencari pekerjaan baru di wilayah di belahaan lain Tiongkok. Akan tetapi usaha mereka untuk bermigrasi juga tidak mendapatkan titik terang yang lebih baik, karena umumnya kaum wanita yang bermigrasi ke luar wilayah Tiongkok, hanya menjadi budak dan jenis pekerjaan lain yang tidak jauh lebih baik dari sebelumnya (Karisma).

Setelah diskriminasi ekonomi dan ketimpangan etnis, isu kontemporer yang berkembang adalah diskriminasi agama yang terjadi bagi umat muslim etnis Uyghur. Pihak kepolisian pemerintah Tiongkok menangkap orang-orang Uyghur dengan alasan menumbuhkan jenggot dan seseorang yang telah mengunduh video berunsur keagamaan enam tahun silam (Conrad, 2020). Larangan untuk solat di Masjid bagi anak di usia dibawah 18 tahun, yang berlaku di setiap bulan Ramadhan yang berlangsung setiap tahun. Peraturan yang di sebut “namaz” telah di sahkan pemerintah sejak 2017 silam. (Nurfajriani, 2020) Pemerintah Tiongkok juga melarang pelaksanaan ibadah pada tempat umum dan area publik. Hal ini membuat pelaksanaan ibadah lima waktu bagi umat Islam dipersulit. Menurut Muhiddin sebagai perwakilan organisasi masyarakat Islam Indonesia yang berkunjung ke Xinjiang, “Ruang Publik disana tidak boleh terkontaminasi dengan aspek keagamaan” (Lubis, 2019)

Nicholas Bequelin selaku Direktur Regional di Amnesty Internasional memaparkan 8 point keresahan, yang di rangkum dalam wawancara di 400 orang Uyghur yang mengungsi keluar negeri, yang mana telah melampaui nilai-nilai HAM. 8 point tersebut adalah ; Kamp interniran massal (*Re-education Camp*), Perlakuan yang tidak manusiawi untuk tahanan Uyghur, Hukuman yang berlebihan, Pemblokiran informasi, Program antiterror Tiongkok, Ditangkap karna menumbuhkan jenggot, Pengawasan massa, Ancaman berbicara (Saputra, 2019).

Dengan melihat tindakan pemerintah Tiongkok yang menindak etnis Uyghur, hal ini mendapatkan respon dari dunia internasional dimana 22 negara menentang kebijakan yang di lakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Namun beberapa hari setelah itu pada tanggal 12 juli 2019, 37 negara anggota PBB mendukung dan setuju atas tindakan pemerintah China. Surat itu di kirim kepada Michelle Bachelet sebagai Komisioner Tinggi HAM PBB. Tiga hari setelah itu, pemerintah Tiongkok mengundang Diplomat, Organisasi Internasional, dan wartawan melalui surat yang di publikasikan ke Xinjiang didalam upaya penyaksian secara langsung kondisi dan kemajuan deradikalisasi dan kontraterorisme yang terjadi disana. (Raharjo, 2019). Didalam daftar 37 namanama negara pendukung pemerintah Tiongkok terdapat beberapa negara Islam didalamnya yang juga tergabung didalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) diantaranya Aljazair, Bahrain, Kuwait, Sudan, Uni Emirat Arab, Somalia, Suriah, Mesir, Pakistan, Arab Saudi, Oman, Turkmenistan dan Tajikistan. (China: Muslim-Majority States Whitewash Abuses, 2019).

Seiring bergantinya waktu, hubungan antara Arab Saudi dan Tiongkok diwarnai keharmonisan. Pada tahun 2017, Hera F. Haryn, seorang reporter CNN Indonesia mengatakan bahwa Tiongkok sebelumnya merupakan negara industri yang hanya fokus dalam bidang manufaktur. Namun demikian, harus ada peningkatan bagi Tiongkok untuk menyeibangi kekuatan itu. Oleh sebab itu, Tiongkok juga akan menjadi Negara Konsumsi. Kendati demikian, Tiongkok pada saat itu akan mengalami perlambatan ekonomi namun di sisi lain *Cash* yang dimiliki Tiongkok tetap Tinggi. Sesuai dengan visi Saudi 2030 untuk menjual Aramco dibursa saham, Tiongkok dirasa tepat untuk menjadi patner bagi Saudi untuk menciptakan hubungan bilateral dalam bidang ekonomi. Lalu alasan kedua terjalinnya hubungan antara Saudi dan Tiongkok yaitu karena jumlah penduduk tertinggi didunia ada diwilayah Tiongkok. Alasan Tiongkok juga mau untuk menandatangani Kerjasama ini, karena Tiongkok adalah negara industri yang dimana tentu melihat Kerjasama energi ini mampu menekan fluktuasi harga minyak dunia demi kepentingan energinya. Oleh karna itu kedua negara mencapai kesepakatan atau *Megadeal* sebesar \$ 65 Miliar investasi Saudi untuk Tiongkok.(Haryn, 2017)

*“Kerja sama Arab-China meningkat dalam kekuatan dan keragaman setiap harinya. Ini adalah kerja sama yang didasarkan pada rasa saling menghormati prinsip-prinsip hukum dan norma internasional; kedaulatan dan kemerdekaan negara, komitmen untuk resolusi damai dari konflik, dan keinginan bersama memperdalam serta memperkuat bidang kerja sama guna mewujudkan kepentingan masyarakat Arab dan Tiongkok”* Kata Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada 7 juni 2020. (Syahrianto, 2020)

Arab Saudi sebagai negara kelahiran Islam yang memiliki persamaan identitas dengan etnis Uyghur justru tidak memberikan suara keadilan bagi masyarakat Uyghur yang notabnya memiliki peramaan identitas ini. Dukungan dari negaranegara Islam seperti Arab Saudi yang dinyatakan oleh Mohammed bin Salman, “Tiongkok memiliki hak untuk melakukan aksi menekan anti-terorisme dan ekstrimis demi kepentingan keamanan nasionalnya.” Kebijakan putra mahkota ini terlihat selaras dengan pendatangannya kesepakatan dagang Tiongkok-Arab yang membuat kesal sekutu baratnya. Pemerintah Tiongkok malah menuduh posisi barat malah mendukung kelompok teroris (Ensor, 2019).

## **PEMBAHASAN**

Arab Saudi dan Tiongkok merupakan aktor pemegang kunci didalam hubungan internasional. Dalam pembahasan ini, Arab Saudi yang menjadi variabel penelitian dalam kebijakan luar negrinya, yang dimana memberika suara mendukung Tiongkok dalam tindakan diskriminasi terhadap etnis Uyghur.

“Tiongkok memiliki hak untuk melakukan pencegahan atas Tindakan antiterorisme, separatisme, dan ekstremisme demi menjaga keamanan secara umum”, Kata Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS) (Nashrullah, 2019). Saudi dalam pembahasan ini tidak mempertimbangkan permasalahan lain seperti identitas atau budaya, karna dalam dunia internasional negara bertindak atas kehendak naluria yang telah dipertimbangkan untuk mendapatkan keuntungan dari sektor tertentu.

Didalam upaya mengejar kepentingan nasional, Indikator ekonomi menjadi tujuan *final* bagi negara yang berambisi memperjuangkan kebijakan sekalipun itu melampaui batas-batasan seperti nilai-nilai hak asasi manusia. Seperti pemahaman dasar realis, fitrah laki-laki itu egois dan agresif serta akan mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri, sehingga merugikan orang lain serta tidak memandang

batasan-batasan hukum atau moralitas apapun (Jill Steans and Lloyd Pettiford, 2009). Sifat agresif negara dan keberadaan dunia yang anarkis memposisikan konflik sebagai sebuah realitas yang harus dihadapi. Atas dasar permasalahan yang kompleks dan upaya subversif dari kelompok etnis Uyghur, tidak dapat diungkiri bahwa Tindakan Tiongkok yang agresif tersebut akan terjadi, dan Arab Saudi tentu melihat kepentingan nasionalnya sendiri tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti persamaan identitas. Hubungan kemitraan dagang dengan Tiongkok sudah terjalin cukup baik. Arab Saudi telah menciptakan hubungan yang kuat dengan Tiongkok melalui faktor ekonomi. Sesuai dengan kepentingan nasional Arab Saudi didalam Visi Saudi 2030, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, Tiongkok dan Arab Saudi bekerja sama di bidang energi terbarukan. Pada Mei 2020 *China's Silk Road Fund* telah membeli 49% saham di platform energi terbarukan *ACWA Power Renewable Energy Holding Ltd* Arab Saudi (Yurong, 2020).

Hans J Morgenthau percaya bahwa "Pemahaman realisme didalam implementasi politik seperti masyarakat pada umumnya yang di pegang oleh pemerintah atas dasar sifat manusia" (Donnelly, 2000). Sifat naluria yang berdasarkan Hasrat untuk mengutamakan diri sendiri (Egosentris) berupaya untuk mengesampingkan aspek moralitas dan nasib orang lain, mengamini segala bentuk tindakan, untuk terpenuhinya Hasrat dan kemewahan. Menurut pemahaman realis, Prinsip moral yang universal (menurut masyarakat internasional) tidak dapat di terapkan pada tindakan negara (Donnelly, 2000). Ambisi dalam realitas politik sangat di pengaruhi oleh kepentingan nasional yang dipayungi oleh dunia yang anarkis. Untuk itu Arab Saudi berupaya untuk mengutamakan kepentingan nasionalnya, bukan menunjukkan kejahatan atau sifat agresif negara lain. Kaum realis skeptis terhadap hukum internasional dan institusi nasional, yang berupaya mengatasi dan menggantikan nasionalisme (Donnelly, 2006, p. 8).

### **Isu Diskriminasi Etnis Uyghur dalam Paradigma Kedaulatan**

Menurut Hans J Morgenthau, kedaulatan itu otoritas tertinggi dari kepemilikan wilayah tertentu dimana mereka yang di dalamnya memiliki kebebasan didalam mengatur urusan dalam negri maupun luar negri, dimana hal tersebut tidak mampu di batasi oleh Perjanjian Internasional ataupun Otoritas Internasional terkait (H. J. Morgenthau & K. W. Thompson, 1978). Kedaulatan internal merupakan suatu system hirarki yang berkuasa atas sebuah kebijakan domestik dan luar negeri dalam menjaga keberlangsungan negara tanpa adanya kontribusi dari pihak lain. Dalam pembahasan ini, Arab Saudi yang menjadi subjek utama pembahasan tulisan ini, berhak menyatakan dukungan terhadap tindakan Tiongkok atas kebijakan domestiknya, didalam upaya pencegahan peningkatan eskalasi ekstremisme dan separatisme, yang mengancam stabilitas domestik Tiongkok. Tiongkok hadir sebagai mitra dagang terbesar Arab Saudi, dimana indikator ekonomi menjadi pondasi hubungan kedua negara. Adanya aspek moral berdasarkan konstruksi masyarakat internasional, yang mengatur hak-hak dasar manusia (HAM) yang harus dilindungi oleh negara, dimana hal ini diawasi negara lain. pada akhirnya, dukungan Saudi tidak dapat dibantah, karena menurut kaum realis kedaulatan merupakan harga mati.

Didalam atribut kedaulatan, Realisme memiliki pandangan bahwa kedaulatan merupakan penyerahan terhadap sebuah negara untuk mengurus dan menentukan nasib negaranya sendiri. Tiongkok memiliki hak untuk menentukan kebijakan terkait isu etnis Uyghur. Arab Saudi yang menjadi subjek penelitian ini, menghargai kedaulatan atas wilayah Tiongkok. Menurut Realisme Saudi tidak mau mencampuri urusan rumah

tangga Tiongkok mengingat hal yang lebih fundamental yaitu kedaulatan Tiongkok. Sudah seharusnya Saudi tidak ikut campur didalam urusan rumah tangga Tiongkok.

### **Isu Diskriminasi Etnis Uyghur dalam Paradigma Kekuatan**

Kekuatan nasional menurut John T Rourke adalah jumlah seluruh atribut yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat digunakan oleh negara tersebut untuk mencapai tujuannya bahkan jika tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan dari negara lain (Rourke, 1986) Kekuatan merupakan ciri dari negara berdaulat. Terlebih sumber daya alam merupakan cara efektif untuk menyajikan *Power* dalam urusan bernegara. (Maratuthoharoh, 2015). Kerja sama antara Arab Saudi dan Tiongkok berpusat kepada sumber daya alam dan energi. Masing-masing negara memiliki visi dan misi yang sama yaitu meningkatkan kekuatan energi dan SDA. *Saudi Vision 2030* dan *One Belt One Road* merupakan visi masing-masing negara. Negara mencari kekuasaan dan mereka menghitung kepentingan mereka dalam bentuk kekuasaan. (Keohane, 1986). Pengejaran kekuasaan bagi negara merupakan hal yang lumrah. Realis menganggap pemegang kekuasaan dan pengejarannya oleh individu dan negara ada dimana-mana dan tidak dapat dihindarkan (Donnelly, 2006)

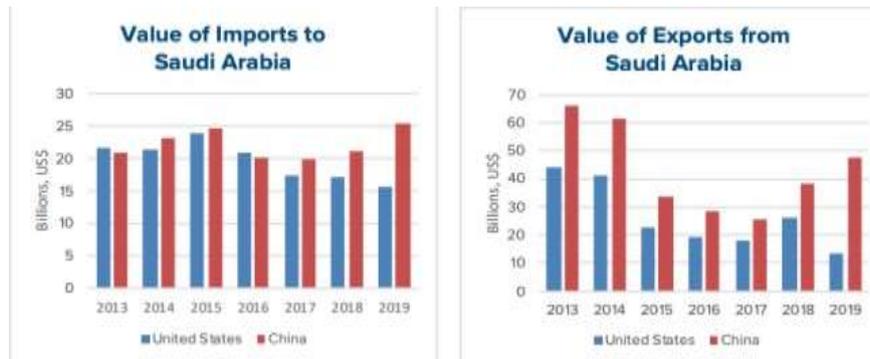
**Table. 1 Nilai Ekspor Arab Saudi Kepada Mitra Dagangnya**

<b>Negara</b>	<b>Besaran</b>	<b>Nilai</b>
<b>China</b>	122%	\$ 25.2 M
<b>India</b>	47%	\$ 8.04 M
<b>Japan</b>	40%	\$ 7 M

*Sumber : (OEC, n.d.)*

Menurut Table 3. telah berhasil memberikan gambaran bahwa Tiongkok merupakan negara terbesar yang menerima produk dari Arab Saudi. Kebutuhan Tiongkok yang tinggi akan sumber energi seperti minyak mentah, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra terbesarnya dalam urusan suplai minyak mentah untuk kebutuhan manufaktur. Selain itu juga perusahaan besar kedua negara seperti *Sinopec* milik Tiongkok dan *Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)* mencapai kesepakatan untuk mengembangkan proyek petrokimia yang akan dijalankan di Tinajin (Newspaper, 2017).

### **Gambar 1. Nilai Ekspor dan Impor Arab Saudi ke Tiongkok dan Amerika Serikat**



Sumber : (Fulton, 2020)

Atribut kekuatan menurut Realisme membawa kebijakan Saudi kedalam situasi yang rasional. Untuk itu, Saudi perlu melakukan kerjasama dengan Tiongkok mengingat kondisi Amerika Serikat secara cepat menjadi produsen minyak terbesar di dunia pada tahun 2020 (Administration, 2021). Dari sumber diatas, Saudi memposisikan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar bagi negaranya. Meskipun hubungannya dengan Amerika Serikat tidak berhenti, namun kondisi politik Saudi dan Amerika sedang tidak baik-baik saja akibat perubahan gaya geopolitik US di Timur Tengah. Oleh sebab itu, negara sebagai aktor individu selalu berfikir rasional untuk mengejar kekuasaan melalui kerja sama ataupun non-kerjasama. Kemudian, Saudi menciptakan mitra cadangannya (Tiongkok) untuk mencapai *Power* yang lebih stabil.

### Isu Diskriminasi Etnis Uyghur dalam Paradigma Kepentingan Nasional

Politik bukan fungsi etika (Donnelly, 2000). Hukum dan moralitas berada pada hirarki yang lebih rendah dalam hubungan internasional (Schwarzenberger, 1951). Untuk itu, diskriminasi yang dilakukan kepada etnis Uyghur bukanlah menjadi kepentingan nasional Arab Saudi. Meskipun diskriminasi menentang nilai-nilai HAM dan tidak sesuai moral, selagi itu tidak adanya unsur kepentingan nasional Arab Saudi, maka menurut kacamata Realis hal tersebut bisa saja dilakukan oleh Arab Saudi dengan menggunakan aspek logis. Saudi memiliki kesempatan yang kecil untuk mendapatkan kepentingan nasional jikalau harus mendukung Uyghur. Kesempatan mendapatkan kepentingan nasional lebih besar dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan pemerintah Tiongkok.

Kepentingan nasional Arab Saudi didalam kerja sama bilateral Tiongkok yaitu menargetkan *Saudi Vision 2030*. Tiongkok dianggap sebagai patner kerja sama yang tepat, dimana kekuatan ekonomi Tiongkok melalui kebijakan luar negrinya *One Belt One Road* (OBOR) telah mencakup 70 negara atau 2/3 populasi dunia, yang mana dinilai mapan sebagai patner kerja samanya (Korwa, 2019). Arab Saudi tentu akan berfikir rasional dimana nilai investasi Tiongkok akan menopang kepentingan nasionalnya. Meskipun dilain sisi, Tiongkok melakukan tindakan represi terhadap umat muslim Uyghur, dimana telah mendapat kecaman dari negara lainnya. Tindakan rasional Arab Saudi sebagai patner kerja sama harusla mendukung apapun bentuk tindakan Tiongkok untuk mendapatkan kebenaran dimata internasional demi tercapainya kepentingan nasional Arab Saudi.

Pada tahun 2017, Mohammed Al-Suwaiyel mendatangi pertemuan ke-empat *World Internet Conference* di Tiongkok. Menteri Arab Saudi menggaris bawahi rencana dan kepentingan nasional Saudi untuk "Kecerdasan buatan, otomatisasi, manufaktur,

dan energi terbarukan." Pada akhirnya MoU antara ACWA dan *China's Silk Road Fund* berhasil diteken dan disepakati. Ditahun 2019, *Saudi-Sino Investment Forum*, Huawei menyepakati 5 point kerjasama dengan Saudi dan perusahaannya dalam menciptakan pembangunan Saudi yang serba *Smart*, seperti ; *Smart Cities, Smart Campuses, Smart Logistic, Smart Education, Smart Traffic, Smart Grids, Smart Security, dan Smart Road*. (Fulton, 2020). Saudi membutuhkan mitra yang mampu mewujudkan pengembangan terhadap industri energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) milik Tiongkok, telah berhasil berkontribusi menghasilkan listrik 66,2 M Kwh pada 2016 dan saat ini Tiongkok menjadi produsen energi surya terbesar didunia (Kompas, 2017). Dengan begitu, kemampuan industri energi terbarukan milik Tiongkok mampu menyukseskan visi Saudi 2030 untuk menciptakan energi terbarukan dan melepaskan ketergantungan APBN dalam sektor energi fosil. Kemampuan perusahaan energi Tiongkok dinilai mampu memfasilitasi kepentingan Arab Saudi dengan begitu aspek moralitas tidak memberikan perhatian lebih untuk Arab Saudi dalam keikut sertaannya dalam isu etnis Uyghur di Xinjiang. Kepentingan Nasional Arab Saudi lebih utama dibandingkan aspek moral. Menurut pandangan Realisme, Aktor utama akan lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya (Egosentris) dan hal tersebut merupakan aspek yang rasional bagi pemimpin negara

## **PENUTUP**

Menurut pandangan Realis, Arab Saudi selaku aktor utama yang menentukan kebijakan luar negrinya akan dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan nasionalnya. Arab Saudi membutuhkan Tiongkok sebagai patner kerja sama bilateral. Faktanya, nilai Investasi Tiongkok kepada Arab Saudi naik 100% pada 2019. Hubungan kerja sama ekonomi kedua negara semakin kuat. *Saudi Vision 2030* dan OBOR merupakan ketentuan mutlak terjalannya kerja sama mencapai kepentingan nasional 2 negara ini.

Sesuai dengan rumusan masalah pada BAB I, mengapa Arab Saudi tidak mendukung etnis Uyghur? kecenderungan Arab Saudi kepada pemerintah Tiongkok didasari atas kebutuhan Arab Saudi terhadap pemerintah Tiongkok dalam mewujudkan *Saudi Vision 2030*. Tiongkok bersedia menjadi mitra Saudi untuk menyukseskan *Saudi Vision 2030*, yang disampaikan langsung oleh Wang yi Menteri Luar Negeri Tiongkok. Selaras dengan pandangan Realisme bahwa negara akan bersifat egosentris dan mengabaikan aspek moral jika hal tersebut tidak terdapat kepentingan nasional didalamnya. Diskriminasi etnis Uyghur merupakan urusan rumah tangga Tiongkok, dimana Saudi lebih menghargai kedaulatan Tiongkok sebagai kepemilikan wilayah. Dengan kondisi ekonomi Saudi yang tidak stabil akibat fluktuasi harga minyak dunia, dan hubungan Saudi dengan Amerika tidak menunjukkan angka kemajuan yang mapan, Saudi perlu menciptakan aliansi baru untuk menciptakan *Balance of Power* jika sewaktu-waktu hubungannya dengan Amerika semakin sulit. Ditambah posisi Tiongkok sebagai distributor panel surya terbesar didunia, mampu mendukung dan menyukseskan pembangunan energi terbarukan untuk Saudi. Kepentingan Nasional Saudi menciptakan rasa abai terhadap nasib masyarakat Uyghur yang semakin sulit akibat upaya Tiongkok dalam *Ethnic cleansing*. Kebutuhan Arab Saudi terhadap kerjasama Tiongkok, mengharuskan Saudi untuk tidak mengambil sikap terhadap diskriminasi etnis Uyghur. Karena menurut kacamata Realisme, yang terpenting dalam interaksi negara dan aliansi, hanya akan berjalan jika ada kepentingan nasional didalamnya. Hal ini berarti, Saudi tidak memiliki kepentingan dan melihat peluang keuntungan jika harus mendukung etnis Uyghur. Maka sikap Saudi dapat disimpulkan merupakan hal yang logis sebagai perilaku negara. Kesimpulannya adalah kerjasama

yang ditawarkan Tiongkok mampu mengikat hubungannya bersama Saudi, yang membuat Saudi tidak mampu bertindak lebih jauh dalam isu diskriminasi etnis Uyghur.

## REFERENSI

- Zai Liang dan Michael J. White. (1996). "Internal Migration in China, 1950–1988,". *Demography*, 33, 3:, 375-384.
- Yuan, Q.-l. (1990). Population Changes in the Xinjiang Uighur Autonomous Region (1949– 1984). *Central Asian Survey*, 49-73.
- Karisma, G. (n.d.). Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 19, No. 1, 41-52.
- Conrad, N. (2020, febuari 18). *Cina Tangkap Banyak Muslim Uighur Tanpa Alasan*. Retrieved from DW: <https://www.dw.com/id/cina-tangkap-banyak-muslim-uighur-tanpa-alasan/a52414594>
- Nurfajriani, r. (2020, september 25). *Tiongkok Larang Uighur Ibadah Salat di Masjid Kecuali Usia di Atas 65 Tahun*. Retrieved from Pikiran Rakyat: <https://www.pikiranrakyat.com/internasional/pr-01771066/tiongkok-larang-uighur-ibadah-salat-di-masjidkecuali-usia-di-atas-65-tahun>
- Lubis, U. (2019). *Muslim Uighur di Xinjiang Sulit Salat 5 Waktu*. Retrieved from IDN TIMES: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/uni-lubis/muslim-uighur-di-xinjiang-sulitsalat-5-waktu/5>
- Saputra, E. Y. (2019, Desember 19). *Amnesty International Paparkan 8 Fakta Kondisi Muslim Uighur*. Retrieved from Tempo: [https://dunia.tempo.co/read/1285496/amnestyinternational-paparkan-8-fakta-kondisi-muslim-uighur?page\\_num=2](https://dunia.tempo.co/read/1285496/amnestyinternational-paparkan-8-fakta-kondisi-muslim-uighur?page_num=2)
- Raharjo, B. (2019, juli 17). *Mengapa Saudi dan Negara Muslim Dukung Cina Soal Uighur?* Retrieved from News Republika: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/newsanalysis/19/07/17/purg9k415-mengapa-saudi-dan-negara-muslim-dukung-cina-soaluighur>
- China: Muslim-Majority States Whitewash Abuses*. (2019, Juli 17). Retrieved from Human Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/07/17/china-muslim-majority-stateswhitewash-abuses>
- Haryn, H. F. (2017, maret 20). *Raja Salman di Cina, Megadeal Tiongkok - Arab Saudi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.youtube.com/watch?v=WKbwHWellr0>
- Syahrianto, M. (2020, juli 08). *Arab Saudi-China Makin Lengket, Kerja Sama Meningkat*. Retrieved from Warta Ekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read293754/arabsaudi-china-makin-lengket-kerja-sama-meningkat?page=1>
- Ensor, J. (2019, Februari 22). *Saudi crown prince defends China's right to put Uighur Muslims in concentration camps*. Retrieved from The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/22/saudi-crown-prince-defends-chinasright-put-uighur-muslims-concentration/>
- Nashrullah, N. (2019, desember 27). *Putra Mahkota Saudi Dukung Cina dalam Kasus Uighur*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/q36962320/putramahkota-saudi-dukung-cina-dalam-kasus-uighur>
- Jill Steans and Lloyd Pettiford. (2009). *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Yurong, C. (2020, November 20). *Graphics: How is BRI bolstering China-Saudi Arabia ties?* Retrieved from CGTN: <https://news.cgtn.com/news/2020-11-20/Graphics-How-is-BRIbolstering-China-Saudi-Arabia-ties--VzqqKFdXSo/index.html>
- Donnelly, J. (2000). *Realism and International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Donnelly, J. (2006). "Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy : American Power and International Society,". *European Journal of International Relations* vol 12 no 2, 32.
- H. J. Morgenthau & K. W. Thompson. (1978). *Politics Among Nations ; Struggle for Power and Peace* . New York: Alfred A.Knopf.
- Rourke, J. T. (1986). *Internasional Politics on World Stage*. Connecticut: The Dushkin Publishing Group.
- Maratuthoharoh, A. (2015). Signifikansi Pembangunan Silk Road di Asia Tengah bagi Keamanan Energi Tiongkok . *Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, 3.
- Keohane, R. O. (1986). *Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond*. In *Neo-Realism and Its Critics*. New York: Columbia University Press.
- OECD. (n.d.). *OECD World*. Retrieved from OECD Saudi Arabia: <https://oec.world/en/profile/country/sau?deltaTimeSelector1=deltaTime3&flowSelector1=flow0>
- Newspaper, E. (2017, maret 16). *Saudi king to sign trade deals worth \$65BILLION with China* . Retrieved from Express: <https://www.express.co.uk/news/world/780057/Saudi-Arabiaking-sign-trade-deal-with-China-Salman-Xi-Jinping>
- Fulton, J. (2020). Thirty Years of Sino-Saudi Relations. *Atlantic Council*.
- Administration, E. I. (2021, juli 26). *Amerika Serikat, Produsen Minyak Terbesar di Dunia pada 2020*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/15/amerika-serikat-produsenminyak-terbesar-di-dunia-pada-2020>
- Schwarzenberger, G. (1951). *Power Politics : A Study of International Society, 2nd ed*. London: Stevens.
- Korwa, J. R. (2019). Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 8, NO. 1 , 4*.
- Kompas. (2017, febuari 07). *China, Produsen Energi Surya Terbesar di Dunia Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "China, Produsen Energi Surya Terbesar di Dunia", Klik untuk baca: https://properti.kompas.com/read/2017/02/07/210000021/china.produsen.energi.surya.t.erbes.*